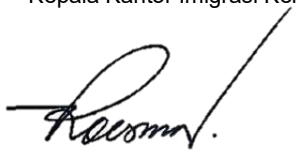
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG

Nomor SOPAP	: WIM.25.IMI.2.OT.02.02-86 TAHUN 2026
Tanggal Pembuatan	: 2 Februari 2026
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 2 Februari 2026
Disahkan Oleh ${ttd_pengirim}	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung,  Ruri H. Roesman NIP 198409092003121003
Nama SOPAP	PENGAJUAN PENCABUTAN DARI DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DAN PERMINTAAN PENANGKAPAN TERSANGKA YANG MASUK DPO KE POLRI

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketigas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan penyidikan keimigrasian;
2. Memiliki kualifikasi PPNS keimigrasian;
3. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait;
4. Memiliki kemampuan administratif;
5. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; dan
6. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan subkoordinator dan koordinator terkait.

Keterkaitan

1. SOPAP Pemanggilan Pertama Tersangka atau Saksi;
2. SOPAP Pemanggilan Kedua dan Perintah Membawa Tersangka atau Saksi;
3. SOPAP Pengajuan Pencantuman dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO Ke POLRI;
4. SOPAP Penangkapan.

Peralatan / Perlengkapan

1. Komputer;
2. *Printer, Scanner*; dan
3. Alat tulis kantor.

Peringatan

Apabila SOPAP tidak dilaksanakan maka proses pengajuan pencabutan dari DPO dan permintaan penangkapan tersangka yang masuk DPO ke Polri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pencatatan Dan Pendataan

Disimpan sebagai dokumen manual maupun elektronik

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TENTANG
PENGAJUAN PENCABUTAN DARI DAFTAR PENCARIAN ORANG (DPO) DAN PERMINTAAN PENANGKAPAN TERSANGKA YANG MASUK DPO KE POLRI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Koordinator Penyidikan Keimigrasian	Sub Koordinator Penyidikan Wilayah I / Wilayah II	PPNS Keimigrasian	JFU/JFT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI				Mulai		a. Surat Perintah Penyidikan; b. Surat Perintah Tugas; c. Laporan Keimigrasian; d. Surat Pengajuan Pencantuman dalam DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI.	1 Jam	Konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI	Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI diajukan apabila Tersangka sudah diketemukan atau meninggal dunia
2.	Memeriksa konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI						Konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI	1 Jam	Persetujuan konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI	
3.	Menyampaikan konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI						Persetujuan Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI	1 Jam	a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI.	
4.	Penandatanganan Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI	T Y					a. Nota Dinas; b. Persetujuan konsep Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI.	1 Jam	Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI	Apabila Atasan Penyidik bukan PPNS, maka ditandatangani oleh PPNS dan atasan mengetahui dengan membubuhkan tanda tangan disamping tanda tangan PPNS
5.	Mencatat Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI pada buku register pencarian orang						a. Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI; b. Buku register pencarian orang.	10 Menit	Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI tercatat pada buku register pencarian orang	
6.	Mengirimkan Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI					Selesai	a. Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI; b. Lembar Tanda Terima Surat.	2 Jam	Surat Pengajuan Pencabutan dari DPO dan Permintaan Penangkapan Tersangka yang Masuk DPO ke POLRI terkirim ke tujuan serta diperoleh tanda terima	Pengajuan Pencabutan DPO dapat diajukan kepada Kepala Kepolisian setempat